

TESIS

**ANALISIS DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK DI 5 NEGARA ASEAN
ANALYSIS ON TAX REVENUE DETERMINANTS IN 5 ASEAN
COUNTRIES**

ANGGI SOMBA PODDALA

A032211006



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

TESIS

ANALISIS DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK DI 5 NEGARA ASEAN ANALYSIS ON TAX REVENUE DETERMINANTS IN 5 ASEAN COUNTRIES

Disusun dan diajukan oleh:

ANGGI SOMBA PODDALA

A032211006



**PROGRAM MAGISTER
EKONOMI PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2023

TESIS

ANALISIS DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK DI 5 NEGARA ASEAN

Disusun dan diajukan oleh

ANGGI SOMBA PODDALA
A032211006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian
Studi Program Magister **Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

pada tanggal **7 Agustus 2023**

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Paulus Uppun, SE., MA.
NIP. 19561231 198503 1 015

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hamrullah, SE., M.Si
NIP. 19681221 199512 1 001

Ketua Program Studi Magister
Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan,



Dr. Indraswati T. A. Reviane, SE., MA., CWM®
NIP. 19651012 199903 2 001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 19640205 198810 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Anggi Somba Poddala**
NIM : A032211006
Program Studi : Magister Ekonomi Pembangunan dan
Perencanaan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul: **Analisis Determinan Penerimaan Pajak di 5 Negara ASEAN** adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan,



Anggi Somba Poddala

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih setia-Nya akhirnya tesis yang berjudul **“Analisis Determinan Penerimaan Pajak di 5 Negara ASEAN”** ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan jasa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Paulus Uppun, SE., MA. sebagai pembimbing utama dan bapak Dr. Hamrullah, SE., M.Si. sebagai pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingannya yang diberikan selama menyelesaikan tesis ini.

Atas segala bantuan yang penulis terima selama mengikuti program magister, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM. Beserta jajarannya, atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan dan menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada ibu Dr. Indraswati Tri Abdireviane, SE., MA., CWM® selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin atas kesediaannya meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menjalani studi hingga selesai. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota tim penguji: ibu Prof. Dr. Rahmatia, SE., MA, bapak Dr. Madris, DPS., SE., M.Si. CWM® dan bapak Dr. Ir. Muhammad Jibril Tajibu, SE., M.Si atas segala masukan dan saran yang membangun serta bermanfaat, sehingga tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Terima kasih penulis ucapkan juga kepada seluruh staf akademik dan Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama penulis menempuh perkuliahan pada Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan rasa hormat dan penuh terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Luther Somba dan Ibunda Hermina Poddala (Almh) dalam mendidik, membesarkan dan mendoakan penulis serta kakak Calfin Somba Poddala S.T, Paramita Poddala S.Ak., M.M dan adikku Theo Sakti, S.T, Zhet Kevin, S.T yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan kasih sayangnya selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman EPP angkatan 2021 yang telah membantu penulis semasa perkuliahan dan kepada Miftha Farild, SE., M.M yang juga membantu penulis selama proses penyelesaian tesis.

Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam karya akademik ini. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diharapkan. "Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia" (Yakobus 1:12). *God bless.*

Makassar, Agustus 2023



Anggi Somba Poddala

ABSTRAK

ANGGI SOMBA PODDALA. *Analisis Determinan Penerimaan Pajak di Lima Negara ASEAN* (dibimbing oleh Paulus Uppun dan Hamrullah).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis penerimaan pajak dengan melihat pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, dan *gross domestic product* (GDP) di lima negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan variabel investasi, pengeluaran pemerintah, *gross domestic product*, dan penerimaan pajak dengan analisis data menggunakan *software E-views*. Periode penelitian ini adalah 2000-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *gross domestic product*; Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *gross domestic product*; *Gross domestic product* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak; Sedangkan investasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui *gross domestic product*; Pengeluaran pemerintah secara langsung tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, namun secara tidak langsung pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak melalui *gross domestic product*.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, *Gross Domestic Product*, Investasi, Pengeluaran Pemerintah.



ABSTRACT

ANGGI SOMBA PODDALA. Analysis on Tax Revenue Determinants in 5 ASEAN Countries (supervised by Paulus Uppun and Hamrullah).

The research aims to elaborate and investigate the tax revenues by focusing on the effect of the investment, government expenditure and gross domestic product (GDP) in five ASEAN countries, namely Indonesia, Malaysia, The Philippines, Singapore, and Thailand. Data analysis used E-views software. The research period was from 2000-2020. The research used the panel data regression with the investment, government expenditure, gross domestic product, and tax revenue variables. The research results indicate that the investment has the positive and significant effect on the gross domestic product and government expenditure has the positive and significant influence on the gross domestic product. The gross domestic product has the positive and significant effect on the tax revenues. Meanwhile, the investment has no effect on tax revenue either directly or indirectly through gross domestic product. Government expenditure has no direct effect on tax revenues, but indirectly government expenditure has a positive and significant effect on tax revenues through gross domestic product.

Key words: tax revenue, gross domestic product, investment, government expenditure.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Penerimaan Pajak	11
2.1.2 Gross Domestic Product (GDP).....	14
2.1.3 Investasi	15
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah	18

2.2 Hubungan Variabel	23
2.2.1 Pengaruh Investasi Terhadap GDP	23
2.2.2 Pengaruh Investasi Terhadap Penerimaan Pajak	25
2.2.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap GDP	26
2.2.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak	28
2.2.5 Pengaruh GDP Terhadap Penerimaan Pajak	29
2.3 Tinjauan Empiris	30
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	34
3.1 Kerangka Konseptual	34
3.2 Hipotesis	36
BAB IV METODE PENELITIAN	37
4.1 Jenis Penelitian	37
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
4.3 Jenis dan Sumber Data	38
4.4 Metode Analisis Data	38
4.5 Definisi Operasional Variabel	40
BAB V HASIL PENELITIAN	41
5.1 Gambaran Umum Negara ASEAN	42
5.2 Deskripsi Data	44
5.2.1 Penerimaan Pajak	44
5.2.2 Investasi	45
5.2.3 Gross Domestic Product	46
5.2.4 Pengeluaran Pemerintah	47

5.3 Deskripsi Hasil Penelitian	49
5.4 Pembahasan	42
5.4.1 Pengaruh Langsung Investasi Terhadap GDP	42
5.4.2 Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah Terhadap GDP	54
5.4.3 Pengaruh Langsung Investasi Terhadap Penerimaan Pajak	56
5.4.4 Pengaruh Langsung Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak	58
5.4.5 Pengaruh Langsung GDP Terhadap Penerimaan Pajak	59
5.4.6 Pengaruh Investasi Terhadap Penerimaan Pajak Melalui GDP	59
5.4.7 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak Melalui GDP	60
BAB VI PENUTUP	62
6.1 Kesimpulan	62
6.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Investasi dan Penerimaan Pajak di 5 Negara ASEAN	6
Tabel 5.1 Tabel Penerimaan Pajak di 5 Negara ASEAN Tahun 2000-2020 Dalam Dollar (\$)	44
Tabel 5.2 Gross Domestic Product (GDP) di 5 Negara ASEAN Tahun 2000-2020 Dalam Dollar (\$)	45
Tabel 5.3 Investasi di 5 Negara ASEAN Tahun 2000-2020 Dalam Dollar (\$)	46
Tabel 5.4 Pengeluaran Pemerintah di 5 Negara ASEAN Tahun 2000-2020 dalam Dollar (\$)	48
Tabel 5.5 Hasil Uji Chow	49
Tabel 5.6 Hasil Uji Hausman	50
Tabel 5.7 Hasil Pengaruh antar Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen	50
Tabel 5.8 Hasil Pengaruh Tidak Langsung	51

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1.1 Perkembangan Persentase Penerimaan Pajak di 5 Negara ASEAN.....	2

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Konseptual Penelitian	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Data Investasi, Pengeluaran Pemerintah, GDP, dan Penerimaan Pajak Dalam Dollar (\$)	72
Lampiran 2. Data Variabel Logaritma Natural (Ln) Investasi, Pengeluaran Pemerintah, GDP, dan Penerimaan Pajak	75
Lampiran 3. Hasil Uji E-views	78
Lampiran 4. Hasil Uji Sobel	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku diberbagai negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya kecuali negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sumber utama penerimaan negara, tidak mengenakan pajak. Pajak menjadi sumber penerimaan negara yang sangat penting sebagai urat nadi kehidupan bangsa artinya penerimaan pajak digunakan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Pandiangan, 2013). Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat (Hutagaol et al., 2007).

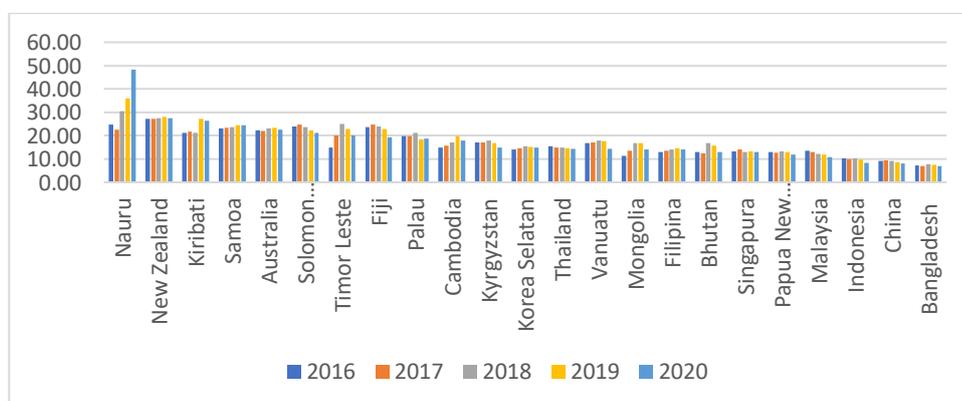
Masalah mengenai penerimaan pajak masih menjadi perhatian di negara maju maupun negara berkembang, termasuk di negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*). Banyak masalah yang diamati seperti kondisi anggaran belanja pemerintah yang tidak pernah seimbang akibat penerimaan pajak yang tidak dapat mengimbangi besarnya biaya yang dikeluarkan suatu negara dalam proses pembangunan sehingga mengkondisikan negara tersebut untuk berusaha memperoleh sumber penerimaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menutupi ketimpangan atau defisit yang terjadi (Wijayanti, 2010).

Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa adanya penerimaan pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Penerimaan negara yang berupa pajak menjadi elemen terpenting

untuk menopang berbagai anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah. Sektor pajak menjadi tumpuan oleh semua negara di dunia yang harus benar-benar diperhatikan secara khusus karena menjadi elemen terbesar dalam penerimaan negara. Pajak menjadi ukuran suatu negara dalam hal kemampuan untuk membiayai keperluan negara secara mandiri. Maka dari itu, setiap negara selalu berupaya memaksimalkan kebijakan pajaknya untuk mewujudkan kesejahteraan negaranya. Akan tetapi saat ini, penerimaan pajak masih menjadi masalah di setiap negara karena penerimaan pajak masih belum optimal.

Data yang diperoleh dari *world bank* menunjukkan nilai persentase penerimaan pajak negara ASEAN masih berada dibawah rata-rata antara Asia-Pasifik dan belum mencapai target. Meskipun sudah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun peningkatan ini belum signifikan dalam meningkatkan posisi penerimaan pajak negara ASEAN. Persentase penerimaan pajak di lima negara ASEAN pada tahun 2020 menempati posisi paling rendah dari rata-rata persentase penerimaan pajak sebesar 19,1 persen sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini:

Grafik 1.1 Perkembangan Persentase Penerimaan Pajak di Negara Asia-Pasifik



Sumber: *World Bank*, 2016-2020.

Dari grafik di atas menunjukkan penurunan terjadi pada tahun 2020 disetiap negara. Indonesia menjadi negara dengan penerimaan pajak paling rendah yang hanya memiliki persentase penerimaan pajak sebesar 8,31 persen pada tahun 2020. Hal ini karena pada tahun 2019-2020 terjadi pandemi covid-19 yang melanda dunia mengakibatkan lumpuhnya aktivitas dan perekonomian negara, penurunan konsumsi, penurunan pendapatan individu dan perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya menyebabkan penurunan pada penerimaan pajak. Konsumsi masyarakat yang turun, menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi dunia usaha dan pelemahan ekonomi yang menyebabkan harga komoditas serta aktivitas ekspor berkurang. Secara singkat, disrupsi yang terjadi pada dunia perekonomian memberikan tekanan terhadap capaian penerimaan pajak yang berjalan (Zhao, 2020).

Dalam mendukung penerimaan pajak, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor pertama pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan *Gross Domestic Product* (GDP) yang dicapai oleh suatu negara, wilayah atau daerah (Djojohadikusumo, 1994). *Gross Domestic Product* merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Penerimaan pajak terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi karena besarnya potensi perpajakan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran kemampuan ekonomi suatu negara.

Pertumbuhan ekonomi yang baik akan menciptakan kondisi perekonomian kondusif yang memicu kinerja ekonomi pelaku usaha sehingga laba pun meningkat. Peningkatan ini akan berlanjut kepada peningkatan kontribusi terhadap penerimaan pajak (Rosalina, 2016). Dalam kondisi *ceteris paribus*, pada saat GDP meningkat maka penerimaan perpajakan akan mengalami peningkatan yang lebih besar. Peningkatan pendapatan per kapita akan selalu diikuti dengan

peningkatan membayar pajak, sehingga pada akhirnya menambah jumlah penerimaan perpajakan bagi negara.

Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik menandakan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2006). Dengan barang dan jasa yang diproduksi bertambah memberikan banyak pilihan produk untuk konsumen, dan kondisi tersebut berakibat keinginan untuk konsumsi meningkat. Kondisi ini juga mendorong tingkat penghasilan masyarakat yang memproduksi barang atau jasa meningkat seiring dengan meningkatnya barang atau jasa yang diperjualkan. Kondisi tersebut secara keseluruhan meningkatkan penerimaan pajak, hal ini dikarenakan kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan besarnya pengeluaran konsumsi (Putri, 2012).

Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan perubahan dalam pendapatan yang diterima oleh masyarakat, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan, menunjukkan semakin tinggi pula pendapatan masyarakat, semakin tinggi pendapatan masyarakat menyebabkan penerimaan pajak akan bertambah (Wijayanti, 2010). Olivia dan Yudianti (2016), (Saragih, 2018), Nugroho & Meiwanto (2010), Widyastuti (2021) pada hasil penelitiannya menunjukkan GDP memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Pratama & Widyastuti (2022) menyatakan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang, GDP memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan pajak perekonomian dan pajak selalu tumbuh bersama sehingga pertumbuhan ekonomi selalu memiliki dampak positif terhadap pajak (Salebu, 2018). Setiap

peningkatan signifikan dalam pengumpulan penerimaan pajak secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya (Karran, 1985). Namun pada kenyataannya, rasio penerimaan pajak terhadap GDP tidak selalu ideal pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Data pada *world bank* menunjukkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di lima negara ASEAN pada tahun 2001, 2009, 2015 dan 2020. Krisis Finansial Asia yang meletus pada akhir 1990-an mengakibatkan dampak sangat negatif untuk perekonomian setiap negara. Krisis tersebut mengguncang pondasi ekonomi dan politik serta menjadi awal sebuah era baru yang penuh dengan tantangan. Setelah Krisis Finansial Asia, pada tahun 2009 terjadi guncangan dan ketidakjelasan finansial global serta meningkatnya konsumsi rumah tangga. Perekonomian kembali menguat pada tahun 2010. Perekonomian terus menguat namun kembali melemah pada tahun 2015 karena adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat dari ledakan harga komoditas 2000-an serta adanya ketidakpastian kondisi pasar keuangan. Kemudian terakhir ditahun 2020 terjadi krisis yang disebabkan oleh virus Covid-19 yang membuat lumpuhnya aktivitas perekonomian. Maka dari fenomena tersebut dibutuhkan salah satu pendorong untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak yaitu penanaman modal atau investasi (Sulistiawati, 2012).

Faktor kedua yaitu penanaman modal atau investasi. Dalam setiap perekonomian, kegiatan memproduksi memerlukan penanaman modal atau investasi. Harrod-Domar dalam teorinya mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu negara dapat mencapai penerimaan pajak yang tangguh atau *steady growth* dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi (Murni, 2013). Investasi merupakan salah satu penggerak penerimaan pajak. Penanaman modal atau investasi untuk penerimaan pajak suatu negara bukan hal baru bagi negara-negara berkembang. Tahap awal sebuah pembangunan pada setiap negara

banyak tergantung pada penanaman modal (Febriana & Muqorobbin, 2014). Dalam hal ini investasi berperan penting karena merupakan salah satu faktor bagi kelangsungan proses penerimaan pajak dalam jangka panjang, dengan adanya investasi yang ditanamkan maka akan terjadi kegiatan produksi yang dapat menciptakan pendapatan masyarakat hingga secara tidak langsung akan menambah penerimaan pajak (Sari & Ilyas, 2019).

Selain itu, telah menjadi fakta secara umum juga bahwa pada beberapa negara, konsentrasi investasi dan sumber daya dianggap mampu mendorong perekonomian suatu negara dengan sangat baik, dimana jika investasi yang terjadi dalam suatu negara mengalami peningkatan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mempengaruhi penerimaan pajak (Jufrida, 2016). Namun data pada *world bank*, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara investasi dan penerimaan pajak. Dimana investasi di negara ASEAN setiap tahunnya mengalami fluktuasi sedangkan pada penerimaan pajak justru mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Tabel 1.1 Perkembangan Investasi dan Penerimaan Pajak di 5 Negara ASEAN

Negara	Tahun	Investasi	Penerimaan Pajak
Indonesia	2016	4,541,713,739.20	1,281,885,902,999,960.00
	2017	20,510,310,832.40	1,342,306,913,501,640.00
	2018	18,909,826,043.50	1,518,025,961,356,800.00
	2019	24,993,551,748.00	1,543,994,683,379,680.00
	2020	19,175,077,747.80	1,283,358,903,801,800.00
Malaysia	2016	13,470,089,920.80	169,343,100,000.00
	2017	9,368,469,822.70	177,658,767,575.10
	2018	8,304,480,741.70	174,059,303,364.30
	2019	9,154,921,685.00	180,565,655,199.60
	2020	4,058,769,678.60	154,398,071,740.90
Filipina	2016	8,279,548,274.90	1,980,390,000,000.00
	2017	10,256,442,398.90	2,250,677,000,000.00
	2018	9,948,598,824.00	1,565,808,680,000.00
	2019	8,671,365,873.70	2,827,840,340,000.00

Negara	Tahun	Investasi	Penerimaan Pajak
	2020	6,822,133,290.80	1,504,421,463,000.00
Singapura	2016	65,363,061,549.60	58,662,972,564.50
	2017	99,210,311,928.60	66,314,736,600.00
	2018	81,180,543,799.90	66,154,772,870.60
	2019	111,479,508,121.60	67,618,890,911.50
	2020	74,750,514,891.10	61,391,992,255.90
Thailand	2016	3,486,184,390.30	2,241,380,385,644.60
	2017	8,285,169,819.70	2,289,174,506,903.00
	2018	13,186,328,517.80	2,442,069,276,093.30
	2019	4,790,362,174.60	2,475,173,267,467.30
	2020	4,845,358,538.20	2,264,268,408,507.60

Sumber: *World Bank*, 2016-2020.

Investasi mengalami fluktuasi setiap tahunnya disebabkan oleh terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008, yang dimulai dengan runtuhnya pasar perumahan Amerika Serikat (AS) dan mempengaruhi perekonomian global secara luas. Krisis ini mengakibatkan penurunan investasi secara global karena lembaga keuangan mengalami kerugian besar dan mengurangi pendapatan investasi. Penurunan investasi ini tidak diimbangi oleh peningkatan penerimaan pajak karena perlambatan ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari krisis. Selain itu, tren harga komoditas selama periode 2019-2020 mempengaruhi investasi dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan komoditas. Harga komoditas mengalami penurunan seperti harga minyak yang pernah turun akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan juga berdampak pada penurunan permintaan konsumen dalam struktur ekonomi investasi dalam sektor tersebut yang juga ikut menurun.

Efek yang terjadi akibat ketidakseimbangan investasi dan penerimaan pajak yaitu terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, kurangnya inovasi dan pengembangan, serta penurunan penciptaan lapangan kerja baru (Paramita, 2020). Investasi sangat penting untuk sebuah penelitian dan pengembangan sebagai pendorong bagi kemajuan teknologi dan inovasi. Namun, jika investasi turun maka akan mempengaruhi upaya suatu negara untuk menciptakan produk

baru, meningkatkan efisiensi, meningkatkan daya saing dan bahkan berkurangnya penciptaan lapangan kerja baru atau pemotongan pekerjaan yang akan berdampak pada penerimaan pajak di masa depan (Sulistiawati, 2012).

Richard & Toly (2013) mengatakan selain investasi, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tarif pajak yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak juga terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara yaitu pengeluaran pemerintah yang ditentukan oleh belanja dan pengeluaran pembiayaan. Terdapat pandangan bahwa penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah saling mempengaruhi satu sama lain yang disebut dengan *fiscal synchronization*. Menurut Kusriyawanto (2014) pengeluaran pemerintah merupakan hal yang penting, peningkatan pengeluaran barang dan jasa secara signifikan meningkatkan penerimaan pajak. hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah erat kaitannya dengan penerimaan pajak (Yusnika, 2018). Jika besar jumlah penerimaan pajak maka akan meningkatkan pula pendapatan yang diterima oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan atau pengeluaran pemerintah (Rania & Sasana, 2016). Penerimaan pajak suatu negara digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, pembangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas dan lain sebagainya (Sukirno, 2013). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agell et al., (2006) memberikan bukti yang sebaliknya, dimana semakin besar pengeluaran pemerintah yang dilakukan maka akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengetahui terkait penerimaan pajak dengan melihat pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah dan GDP di lima negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap GDP di 5 negara ASEAN?
2. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap GDP di 5 negara ASEAN?
3. Apakah GDP berpengaruh terhadap penerimaan pajak di 5 negara ASEAN?
4. Apakah investasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak di 5 negara ASEAN?
5. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan pajak di 5 negara ASEAN?
6. Apakah investasi berpengaruh terhadap penerimaan melalui GDP di 5 negara ASEAN?
7. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui GDP di 5 negara ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh investasi terhadap GDP di 5 negara ASEAN.
2. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pengeluarann pemerintah terhadap GDP di 5 negara ASEAN.
3. Untuk memngukur dan menganalisis pengaruh GDP terhadap penerimaan pajak di 5 negara ASEAN.
4. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh investasi terhadap penerimaan pajak di 5 negara ASEAN

5. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak di 5 negara ASEAN.
6. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh investasi terhadap penerimaan pajak melalui GDP di 5 negara ASEAN.
7. Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak melalui GDP di 5 negara ASEAN.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang penerimaan pajak dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti investasi, pengeluaran pemerintah dan GDP.
2. Bagi pemerintah sebagai pengambilan kebijakan dalam membantu meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, pengeluaran pemerintah dan GDP sebagai realisasi pengurangan permasalahan penerimaan pajak dan terciptanya masyarakat yang sejahtera.
3. Lingkungan akademis, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis dan digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan penelitian dalam bidang penerimaan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak menurut Soemitro (1987), adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Soemarso (2007), pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual.

Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi *budgeter* (fungsi finansial) dan fungsi *regulated* (fungsi mengatur). Selain itu terdapat fungsi distribusi dan fungsi demokrasi. Fungsi distribusi merupakan pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Fungsi demokrasi merupakan salah satu perwujudan

pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2011).

Adapun jenis-jenis pajak yaitu: pertama, menurut golongan pajak dieklompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibenakan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan (PPH). Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN). Kedua, menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif merupakan pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subyeknya. Contoh: pajak penghasilan (PPH). Pajak objektif merupakan pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak maupun tempat tinggal. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Ketiga, menurut lembaga pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak Negara (pajak pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan (PPH), pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan, bea materai. Pajak daerah merupakan pajak uang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri dari pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota. Contoh: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan lain-lain (Resmi, 2011).

2.1.2 Penerimaan Pajak

Secara umum penerimaan pajak adalah uang yang diterima oleh pemerintah dari masyarakat atau perusahaan melalui sistem pajak. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah dan penting untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Menurut Rahayu (2017) Penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak.

Teori elastisitas pendapatan menjelaskan bagaimana tingkat penerimaan pajak akan berubah seiring dengan perubahan tingkat pendapatan. Teori ini berpendapat bahwa penerimaan pajak dan tingkat pendapatan memiliki hubungan yang elastis, yaitu penerimaan pajak akan merespons secara proporsional terhadap perubahan tingkat pendapatan. Jika elastisitas pendapatan pajak positif dan lebih besar dari satu, maka penerimaan pajak akan meningkat lebih besar dibandingkan dengan tingkat pendapatan. Sebaliknya, jika elastisitas pendapatan pajak negatif dan kurang dari satu, maka penerimaan pajak akan menurun lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pendapatan. Dengan demikian, teori elastisitas pendapatan membantu pemerintahan untuk memahami bagaimana perubahan tingkat pendapatan akan mempengaruhi penerimaan pajak dan membantu dalam perencanaan fiskal yang efektif (Afandi, 2014).

Menurut Simanjuntak & Mukhlis (2012), Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan

pembangunan maka optimalisasi penerimaan pajak merupakan salah satu cara untuk menandai pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

2.1.3 Gross Domestic Product

Gross Domestic Product (GDP) secara umum adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Menurut (Sukirno, 2013), GDP didefinisikan sebagai produk nasional yang diwujudkan oleh faktor-faktor produksi dalam negeri (milik warga negara dan orang asing) dalam suatu negara. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Dalam teori Keynesian menyatakan bahwa pemerintah harus memainkan peran aktif dalam mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah relasi. Penerimaan pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat konsumsi melalui pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak yang tinggi memungkinkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi, jika penerimaan pajak terlalu tinggi dan membebani warga negara, hal ini dapat mengurangi konsumsi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negatif. Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan tingkat pajak dan memastikan bahwa penerimaan pajak berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat konsumsi. Secara umum, teori Keynesian mengenai penerimaan pajak menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki efek penting pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat konsumsi dan harus dikelola dengan baik oleh pemerintah

agar dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan berkelanjutan (Jhingan, 2003).

Menurut teori Neoklasik, penerimaan pajak memotong pendapatan produsen dan konsumen, sehingga mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi. Penerimaan pajak yang tinggi akan memperlambat investasi karena produsen akan memiliki pendapatan yang lebih rendah, sehingga mempengaruhi tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi. Teori tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi (Pratama & Widyastuti, 2022).

Teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian sapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan yaitu barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan adalah proposional dengan pendapatan nasional, rasio modal-produksi (*capital output ratio*) tetap nilainya dan perekonomian terdiri dari dua sektor. Melalui analisis Harrod-Domar dapat dilihat bahwa dalam jangka panjang pertambahan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang teguh hanya mungkin dicapai apabila $I + G + (X-M)$ terus menerus mengalami peningkatan (Sukirno, 2006).

Berbeda dengan teori endogen yang menganggap bahwa penerimaan pajak tidak hanya memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memiliki efek positif. Penerimaan pajak dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan membiayai pengeluaran pemerintah yang memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Dengan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, penerimaan

pajak dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Sumaryani, 2019).

Menurut teori ekonomi makro, GDP merupakan nilai pasar keluaran total sebuah negara. Hal ini berarti nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa ada 3 pendekatan dalam menghitung GDP, yaitu:

1. Pendekatan pengeluaran (*Expenditure Approach*) merupakan besaran nilai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) dan pemerintah ditambah dengan investasi (pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori), serta ekspor neto (ekspor dikurang import). Secara matematis dituliskan sebagai berikut:

$$Y = C + G + I + (X - M)$$

2. Pendekatan pendapatan (*Income Approach*) dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat (pemilik faktor produksi) sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi, meliputi: Upah/gajih (w), sewa (r), bunga (i) dan keuntungan (profit/ p). Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = w + r + i + p$$

3. Pendekatan Produksi (*Production Approach*), pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah (*value added*). Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = (Q_1 \times P_1) + (Q_2 \times P_2) + (Q_3 \times P_3) + \dots + (Q_n \times P_n)$$

P_1 = Harga barang ke -1

Q_1 = Jenis barang ke-1.

2.1.4 Investasi

Menurut Sukirno (2013) menyatakan investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dapat diartikan juga sebagai penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Menurut Adam Smith investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan untung dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi. Pada waktu laju pemupukan modal meningkat, persaingan antar pemilik modal akan meningkat (Jhingan, 2003).

Dalam teori Harrod-Domar dikatakan setiap perekonomian harus menabung sebagian tertentu dari pendapatan nasionalnya, jika hanya untuk mengganti barang modal (bangunan, peralatan dan material) yang sudah usang atau rusak. Namun, untuk tumbuh diperlukan investasi baru yang mewakili penambahan bersih pada persediaan modal. Jika berasumsi bahwa ada beberapa hubungan ekonomi langsung antara ukuran total stok modal (K) dan total GDP (Y), maka setiap penambahan bersih pada stok modal dalam bentuk investasi baru akan membawa peningkatan yang sesuai dalam aliran *output* nasional atau GDP (Todaro & Smith, 2003).

Teori Keynes menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat mempengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Jumlah atau banyaknya investasi tidak hanya bergantung pada pengembalian atau satu faktor saja, tapi dipengaruhi juga oleh biaya modal atau tingkat bunga. Mengacu pada teori tersebut, keputusan investasi itu dapat diambil dengan membandingkan *Marginal Efficiency of Capital* (MEC) atau keuntungan yang diharapkan dari sebuah investasi dengan tingkat bunga riil (r). Ketika nilai MEC lebih besar dibandingkan tingkat bunga riil, maka disarankan melakukan investasi. Investasi dapat disebut menguntungkan saat nilai MEC mencapai nilai yang sama dengan biaya modal yang dikeluarkan (Sukirno, 2006).

Menurut Azis et al., (2015) investasi adalah sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. (Tambunan et al., 2015) Investasi sangat penting untuk berkelanjutan pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kegiatan produksi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan pasar. Investasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Real Assets*, merupakan jenis investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan, dan sebagainya. Investasi pada *real assets* diwujudkan dalam bentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan dan lainnya.
2. *Financial assets*, terdiri dari dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Investasi pada *financial assets* dilakukan di pasar uang atau pasar modal.

2.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, seperti pembelian persenjataan dan alat-alat kantor pemerintah, pembangunan jalan dan bendungan, gaji pegawai negeri, angkatan bersenjata, dan lainnya. Pengeluaran pemerintah merupakan instrument pengukur dimana pemerintah menentukan seberapa besar peran sektor pemerintah dan sektor swasta. Di samping itu, pengeluaran pemerintah dapat menjadi penentu pokok jumlah pengeluaran agregat dan juga penentu pendapatan pemerintah jangka pendek (Dewi & Sarfiah, 2022).

Mangkoesoebroto dalam Azwar (2016) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Teori Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Semakin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya (Mangkoesoebroto, 2001). Beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan

ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Teori ini mendasarkan bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak (Afandi, 2014). Dalam teori ini terdapat efek penggantian yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GDP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi. Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ketangan pemerintah. efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (Nopirin, 2000).

Teori batas kritis Collin Clark mengemukakan tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GDP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang. Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain melebihi 25 persen dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahawa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregat. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat (Bado, 2017).

Persamaan keseimbangan pendapatan nasional menurut Keynes adalah $Y = C + I + G$. dimana (Y) adalah pendapatan nasional, (C) adalah pengeluaran konsumsi dan (G) adalah pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai (G) terhadap (Y) serta mengamati dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional. Menurut Keynes, untuk menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, pemerintah berupaya untuk meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih tinggi dari pendapatan nasional, sehingga dapat mengimbangi kecenderungan mengkonsumsi (C) dalam perekonomian (Azwar, 2016).

Menurut Sukirno (2013) pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui instrument anggaran.

2.2 Hubungan Variabel

2.2.1 Pengaruh Investasi Terhadap Gross Domestic Product

Teori umum yang digunakan dalam menjelaskan hubungan antara investasi dan produk domestik bruto adalah teori akumulasi kapital yang dikembangkan oleh Adam Smith. Teori ini menyatakan bahwa tingkat investasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Investasi memiliki dampak positif terhadap produksi dan produktivitas, yang memperkuat tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, investasi memperkuat akumulasi kapital dan mempercepat perubahan teknologi dan proses produksi. Investasi membantu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas lapangan kerja, sehingga meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Teori ini juga menyatakan bahwa tingkat investasi akan mempengaruhi tingkat produktivitas dan GDP secara keseluruhan. Investasi yang berfokus pada peningkatan teknologi dan infrastruktur akan memperkuat kapasitas produksi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, teori ini menjelaskan bahwa hubungan antara investasi dan GDP adalah simbiotik, dimana kedua faktor saling mempengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Teori tersebut sesuai dengan penelitian Febriana & Muqorobbin (2014) yang menunjukkan bahwa investasi dan GDP saling mempengaruhi satu sama lain dalam analisis jangka pendek maupun jangka panjang.

Mankiw dalam Sulaksono (2015) menyatakan investasi dapat menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang akan mendorong peningkatan volume produksi yang selanjutnya akan meningkatkan GDP. Todaro & Smith (2003) mengungkapkan Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan

kehidupan ekonomi setiap negara, karena pembentukan modal memperbesar kapasitas produksi, menaikkan pendapatan nasional sehingga GDP meningkat.

Menurut Ocaya et al., (2012) investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa yang akan datang. Apabila semua tenaga kerja berkualitas terlibat aktif dalam perekonomian, akan meningkatkan output barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi.

Pack, H. dan J. Page dalam Seran (2017) dalam studi empirisnya menyatakan bahwa terdapat dua sumber utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan produktivitas. Investasi berkaitan dengan pemakaian faktor produksi kapital (K). sedangkan produktivitas dari masing-masing faktor produksi dapat dihitung secara parsial, atau dihitung secara total untuk semua input produksi.

Menurut Harrod-Domar, investasi merupakan kunci utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi investasi di suatu daerah (Fosu, 2011). Strategi paling mendasar bagi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan bagian dari pendapatan nasional untuk ditabung, dengan tabungan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2003). Argument dasarnya bahwa pendapatan yang tinggi dari pengusaha dan perorangan akan menaikkan investasi dan pertumbuhan ekonomi (Djojohadikusumo, 1994). Setelah itu baru mekanisme "*trickle-down effect*" (dampak merembes ke bawah) berjalan dengan melalui program perpajakan dan subsidi.

Investasi memegang peranan penting dalam teori pembangunan, sehingga sering disebut "*engine of growth*". Model-model pertumbuhan klasik dan neo klasik mengandalkan investasi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena dengan investasi yang tinggi akumulasi kapital dapat dicapai.

2.2.2 Pengaruh Investasi Terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian Akbar (2020) menunjukkan bahwa investasi asing memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak di negara AEOI (*Automatic Exchange of Information*) menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh tambahan modal dari investasi asing dapat menggunakannya untuk ekspansi bisnis. Selama proses ekspansi tersebut memungkinkan perusahaan akan banyak mengeluarkan biaya seperti untuk membangun pabrik, memperbaharui atau menambah mesin produksi, hingga menambah bahan mentah untuk produksi dengan tujuan meningkatkan volume penjualan atau jasa. Hal tersebut dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak mengingat transaksi yang dilakukan perusahaan kepada pemasok (*supplier*) mendorong meningkatkan keuntungannya. Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Hemanona dan Suharyono (2017), karena telah membuktikan bahwa investasi asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Hemanona & Suharyono (2017) menggambarkan hubungan antara investasi asing langsung dan penerimaan pajak menjelaskan bahwa adanya investasi asing langsung Amerika Serikat memiliki pengaruh positif di Indonesia melalui penerimaan pajak negara. Tingkat pajak yang rendah akan menguntungkan investor dalam menjalankan bisnisnya di *host country*, teori pergerakan modal internasional mengemukakan bahwa adanya potensi keuntungan dan biaya karena perbedaan profit dan *interest rate* yang berbeda di

tiap-tiap negara. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, perusahaan tidak ragu untuk melintasi batas negara apabila pemerintah setempat membuka peluang untuk berinvestasi. Pembukaan investasi asing langsung tentu akan meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan perusahaan asing beroperasi di Indonesia. Paramitha (2011) membuktikan bahwa investasi asing langsung Jepang yang beroperasi di Indonesia memenuhi manfaat finansial yang dapat menghasilkan pendapatan bagi negara berupa pajak, dividen dan royalti.

2.2.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Gross Domestic Product

Menurut Barro dalam pertumbuhan endogen memprediksi bahwa hanya belanja pemerintah yang produktif dan positif akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan jangka panjang. Barro membagi pengeluaran pemerintah menjadi produktif dan tidak produktif, apabila pengeluaran tersebut mempunyai efek positif langsung terhadap GDP dikarenakan mampu meningkatkan produksi dan efisiensi tenaga kerja sehingga mendorong pertumbuhan, maka pengeluaran tersebut produktif. Pengeluaran pemerintah untuk non produktif berkorelasi dengan pendapatan per kapita yang rendah. Sejalan dengan penelitian Anitasari & Soleh (2015) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap GDP.

Sijabat (2017) mengungkapkan bahwa sebelum desentralisasi fiskal pengeluaran untuk pendidikan memberikan efek positif terhadap GDP. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mampu mendorong pengembangan sumber daya manusia yang lebih besar dan ini merupakan satu-satunya faktor penting dalam mewujudkan GDP sebelum desentralisasi fiskal periode 1994-1997, setelah desentralisasi pengeluaran

produktif sektor keamanan, sektor publik, kesehatan dan pendidikan mendorong pertumbuhan di tingkat provinsi periode 2011-2015.

Menurut pendekatan Keynesian menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, dan net ekspor. Menurut Keynes untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diukur pada peningkatan pendapatan nasional, diperlukan peningkatan permintaan konsumsi, permintaan pengeluaran pemerintah, permintaan investasi, serta permintaan ekspor dan impor. Ekonom lain, Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Hasilnya terbukti menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Kecenderungan ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah (*law of ever increasing state activity*) (Mehmood, 2018).

Tugas utama pemerintah di negara berkembang adalah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan GDP, dilihat dari pengeluaran pemerintah diberbagai bidang. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan pada sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Studi (Edame & Eturoma, 2014) mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap GDP di Nigeria.

2.2.4 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak

Wijaya (2000) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai efek pengganda (*Multiplier Effect*) dan merangsang kenaikan penerimaan pajak yang lebih besar daripada pembayaran dalam jumlah yang sama. Pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan serta produksi secara berganda sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*).

Menurut Barro (1979) dalam *intertemporal tax smoothing model* menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan penerimaan pajak. Barro melihat bahwa ada peningkatan pengeluaran pemerintah selama masa perang yang kemudian diikuti oleh peningkatan pajak secara permanen. Hubungan seperti ini disebut juga *spend-tax hypothesis*. Yang juga didukung oleh teori Peacock dan Wiseman (1979) yang menyatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Hasil penelitian dari Nur & Naldi (2016), Sihombing (2013) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berdampak positif dan signifikan pada penerimaan pajak. Artinya berkurangnya pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan penerimaan pajak. Disisi lain penelitian dari Arofah et al., (2015) menunjukkan pengeluaran pemerintah tidak signifikan dan positif terhadap pendapatan nasional. Hal ini karena pengeluaran pemerintah selalu melebihi penerimaannya sehingga sering terjadi defisit anggaran.

2.2.5 Pengaruh Gross Domestic Product Terhadap Penerimaan Pajak

Pada dasarnya, GDP menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai GDP yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi besar, begitu juga sebaliknya. GDP menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. Idealnya, pertumbuhan GDP akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan. Sejalan dengan hal tersebut penelitian dari Sihalo (2020) menunjukkan hasil bahwa GDP berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena secara teori dapat dijelaskan peningkatan GDP dapat meningkatkan daya beli konsumen terhadap produk-produk perusahaan sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan adanya peningkatan profitabilitas perusahaan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan.

Gross Domestic Product merupakan suatu peningkatan atau naiknya output masyarakat atau penduduk yang dilatar belakangi oleh semakin banyaknya atau semakin meningkatnya suatu jumlah faktor produksi yang dapat digunakan dalam memproduksi, tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri (Arsyad, 2010). Sehingga semakin besar GDP, semakin besar pula potensi peningkatan pendapatan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Olivia & Yudianto (2016) yang menyatakan bahwa GDP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, sedangkan Harahap et al., (2018) menolak pernyataan tersebut dan menyatakan GDP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kebijakan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dapat dilihat dari perkembangan GDP yang terjadi. Semakin besar pertumbuhan ekonomi menandakan kemampuan penghasilan masyarakat meningkat, sehingga pemerintah berupaya untuk dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak (www.pajak.co.id). Hal tersebut sesuai dengan penelitian Myles (2000) bahwa penerimaan pajak merupakan salah satu faktor paling signifikan yang berkontribusi terhadap GDP suatu negara.

Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa GDP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak seperti hasil penelitian dari Sumaryani (2019) dan (Hasna, 2019). Sedangkan Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari Margono et al., (2019) yang menyatakan bahwa GDP tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

2.3 Tinjauan Empiris

Oyeyinka (2020), melakukan penelitian tentang *Investigating the Government Revenue-Expenditure Nexus: Empirical Evidence for the Free State Province in a Multivariate Model*. Analisis kointegrasi menegaskan adanya hubungan jangka panjang antar variabel. Hasil analisis kausal menunjukkan kausalitas dua arah antara penerimaan pemerintah dan pengeluaran pajak baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek mendukung hipotesis sinkronisasi fiskal.

Inriama & Setyowati (2020), melakukan penelitian dengan metode penelitian menggunakan regresi data panel dengan estimasi *Random Effect Model* atau *Generalized Least Square* (GLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PDB, FDI dan *tax rate* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax revenue*.

Ginting (2020), melakukan penelitian dengan menggunakan error model koreksi dari tahun 2000-2004. Indonesia adalah fiskal kontraktif kebijakan merupakan upaya untuk meningkatkan GDP dan belanja negara memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Sumaryani (2019), melakukan penelitian dengan hasil estimasi mempergunakan *Error Correction Model* (ECM) menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, inflasi berpengaruh signifikan dalam jangka waktu panjang, pengangguran dalam jangka waktu panjang memiliki pengaruh signifikan, pendidikan memiliki pengaruh signifikan kepada penerimaan pajak di Indonesia.

Sari & Ilyas (2019), melakukan penelitian dengan hasil pengujian hipotesis menemukan bahwa PDRB positif berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan penanaman modal berpengaruh positif atas penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota provinsi Bengkulu.

Saragih (2018), melakukan penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak Indonesia periode 2013-2016. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tiap provinsi di Indonesia.

Salebu (2018), melakukan penelitian dengan hasil menunjukkan bukti kuat bahwa penanaman modal asing (PMA) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak dan pengaruh PDB terhadap penerimaan pajak menunjukkan hubungan yang signifikan. Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat dikatakan bahwa secara agregat masuknya PMA ke Indonesia akan meningkatkan

penerimaan pajak secara jangka panjang. Namun demikian, ditemukan fakta bahwa peningkatan PDB berpengaruh signifikan yang negatif terhadap penerimaan pajak yang menunjukkan bukti bahwa peningkatan PDB tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak.

Hemanona & Suharyono (2017), melakukan penelitian dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, didapatkan hasil bahwa variabel *foreign direct investment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak sebesar 8,9% serta memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel tenaga kerja dengan nilai sebesar 17,5%.

Abdullah & Rusdarti (2017), melakukan penelitian dengan metode analisis regresi berganda, penelitian ini menemukan adanya pengaruh positif dari belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada tiga negara yaitu Indonesia, Singapura dan Thailand. Sementara itu, fokus kajian mengenai kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih sedikit.

Jean et al., (2013), melakukan penelitian dengan menggunakan metode ekonometrika dengan alat analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi dan inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki peranan paling besar dalam mempengaruhi penerimaan pajak.

Putri (2012), penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh secara bersama-sama antara variabel investasi, pendapatan per kapita, inflasi dan belanja pemerintah terhadap penerimaan pajak reklame. Koefisien determinasi 95,1% dapat dijelaskan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti. Pendapatan per kapita dan jumlah investasi positif berpengaruh, sedangkan inflasi berpengaruh

signifikan negatif dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Herman (2007), melakukan penelitian dari tahun 1985-2005 dengan hasil penelitian menunjukkan variabel konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, impor dan GDP berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Teori klasik mengenai penerimaan pajak menjelaskan bagaimana pemerintah dapat mengumpulkan pajak dari masyarakat dan bagaimana pajak dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Teori ini juga menyatakan bahwa pajak dapat memiliki efek positif jika digunakan untuk membiayai pemerintah dalam mengelola perekonomian dan memfasilitasi GDP. Secara umum, teori klasik mengenai penerimaan pajak mengungkapkan bahwa pajak memiliki efek kompleks dan memerlukan pengelolaan yang tepat agar penerimaan pajak dapat berfungsi dengan baik dan membantu pemerintah dalam memfasilitasi GDP.

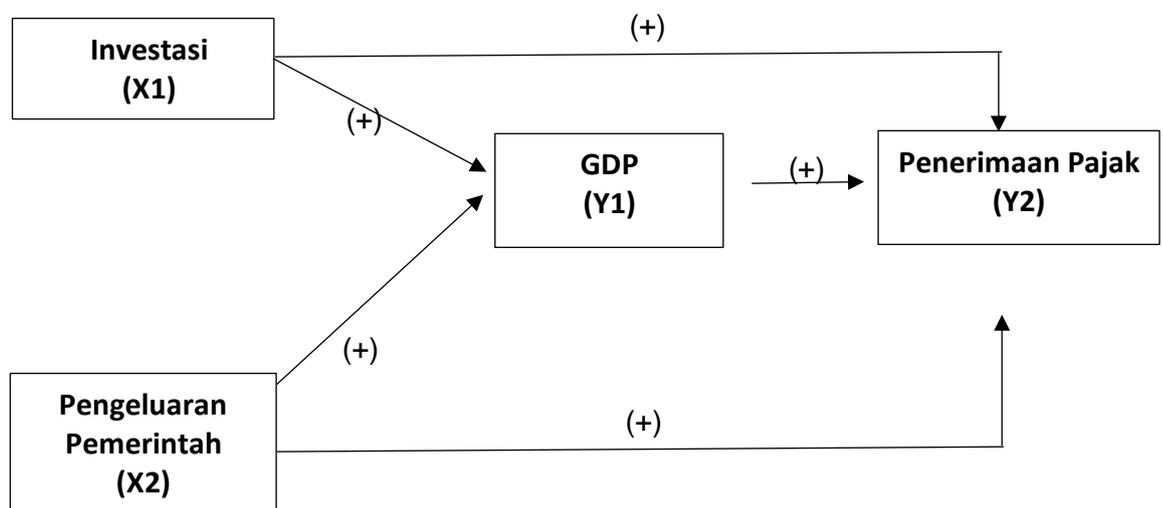
Menurut teori Harrod-Domar menyatakan bahwa untuk menumbuhkan suatu perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat (Sukirno, 2006).

Gross Domestic Product akan selalu terjadi apabila adanya pengeluaran pemerintah dan investasi yang bertambah secara terus menerus maka akan merespon secara otomatis GDP. GDP yang diharapkan adalah pertumbuhan ekonomi yang *pro poor* yang dapat menyebar setiap golongan masyarakat. Disamping hal tersebut dengan adanya pengeluaran pemerintah, investasi tentunya akan meningkat kualitas tenaga kerja yang mampu menopang dan mendorong terjadinya GDP (Riyadi & Woyanti, 2022).

Selain itu, investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki peran penting yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nasional yang selanjutnya dapat meningkatkan pajak. Investasi juga dapat meningkatkan tingkat pekerjaan dan pendapatan individu yang dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sumber-sumber seperti pajak penghasilan dan pajak konsumsi. Tidak hanya itu, pengeluaran untuk infrastruktur dan pendidikan pun dapat memberikan dampak terhadap penerimaan pajak karena meningkatkan tingkat produksi dan pendapatan nasional (Sari & Ilyas, 2019).

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka kerangka konseptual penelitian digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1
Kerangka Konseptual Penelitian



3.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan penelitian sebelumnya seperti yang telah dikemukakan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP di 5 negara ASEAN.
2. Diduga investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di 5 negara ASEAN.
3. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP di 5 negara ASEAN.
4. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di 5 negara ASEAN.
5. Diduga GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di 5 negara ASEAN.
6. Diduga Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak melalui GDP di 5 negara ASEAN.
7. Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak melalui GDP di 5 negara ASEAN.